
Pengaruh Pengangguran, Jumlah Penduduk, dan IPM Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2023

Alan Maulana Fadhil¹, Yufita Listiana^{2*}, Nuril Lailia³, Nadiya Husna⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura
Email: yufita.listiana@trunojoyo.ac.id
DOI: <https://10.21107/bep.v5i2.26317>

ABSTRACT

Poverty in NTT is one of the many social problems that exist in this country. The purpose of this study is to determine the impact of the variables used. The impact of unemployment, population, and HDI on poverty in NTT from 2019 to 2023. The data used includes other bibliographic sources and data sources from the Central Statistics Agency (BPS). This research is quantitative and uses panel data. The model chosen is the random effect model. The results of this study show the impact of unemployment, population, and HDI on poverty. Some data show that the population and HDI variables have a significant influence on poverty, but the unemployment rate variable does not significant.

Keywords: HDI, Population, Unemployment

ABSTRAK

Kemiskinan di NTT merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan sosial yang ada di negeri ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari variabel yang digunakan. Dampak pengangguran, jumlah penduduk, dan IPM terhadap kemiskinan di NTT tahun 2019 hingga 2023. Data yang digunakan meliputi sumber bibliografi lain dan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data panel. Model yang dipilih adalah model random effect. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak pengangguran, jumlah penduduk, dan IPM terhadap kemiskinan. Beberapa data menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan IPM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, namun variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh.

Kata Kunci : IPM, Jumlah Penduduk, Pengangguran

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang masih dihadapi Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi yang menjadi prioritas pembangunan. Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah memiliki banyak program untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan memiliki dua strategi yang harus dilakukan. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melatih mereka agar memiliki kemampuan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Ferezagia, 2018).

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu krusial yang dihadapi bangsa ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, tingkat kemiskinan nasional

mencapai 9,66%, atau setara dengan 26,36 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, yang didefinisikan sebagai pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 493.171.

Kemiskinan di Indonesia tersebar tidak merata di berbagai wilayah. Daerah pedesaan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur, serta peluang ekonomi yang lebih sedikit. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan dan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara (Ferezagia, 2018).

Salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat tidak ditolak (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan. Dampak dari tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu negara dapat menimbulkan kriminalitas, pengangguran, masalah kesehatan, kekacauan sosial dan politik. Pemerintah telah melakukan banyak kegiatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan masyarakat, dan keamanan (Siagian dan Budhi, 2023). Ketika seseorang membandingkan kehidupan mereka saat ini dengan kehidupan orang lain yang dianggap memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang lebih tinggi, mereka akan merasa lebih sadar tentang kemiskinan. Hal ini dapat menjadi masalah bagi pemerintah untuk menentukan siapa yang miskin karena mereka sendiri tidak sadar tentang tingkat kemiskinannya (Hatta and Khoirudin, 2020).

Persentase 5 provinsi di Indonesia yang termiskin di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
5 Provinsi termiskin di Indonesia Tahun 2022

No	Provinsi	Kemiskinan %
1	PAPUA	26.03
2	PAPUA BARAT	20.49
3	NUSA TENGGARA TIMUR	19.96
4	MALUKU	16.42
5	GORONTALO	15.15

Sumber : BPS 2023

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 22 kabupaten dan kota di setiap kepulauannya. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, Provinsi NTT memiliki persentase kemiskinan yang cukup tinggi. Persentasenya saat ini adalah 19,96%, yang merupakan yang terburuk di Indonesia (Dahlan dan Mullianingsih, 2023). Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur tertinggi ketiga di Indonesia, setelah Papua dan Papua Barat, dengan 19,96%. Hal ini dapat terjadi karena kondisi alam sebagian besar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kering dan tandus, gersang hampir setiap tahun, masyarakat Nusa Tenggara Timur menghadapi kekeringan dan kerawanan pangan. Di Nusa Tenggara Timur, penyebab utama kemiskinan adalah gizi buruk, angka putus sekolah, kemiskinan, dan akses yang tidak memadai terhadap layanan kesehatan. Pada akhirnya, fasilitas kesehatan yang tidak memadai akan menjadi rantai berikutnya. Persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Presentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin %
2019	21.09
2020	20.9
2021	20.99
2022	20.05
2023	19.96

Sumber : BPS 2023

Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur sebesar 21,09 persen, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan menjadi 20,9 persen, kemudian naik kembali pada tahun 2021 menjadi 20,99 persen pada tahun 2020. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 20,05 persen dan terus menurun hingga menjadi 19,96 persen di tahun 2023. Penurunan persentase kemiskinan ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah cukup baik. Namun, meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin yang cukup tinggi, seperti Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sabu Raijula (Badan Pusat Statistik, 2019). Persentase kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 meningkat sebagai dampak dari pandemi Covid-19, menurut Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur. Sektor pariwisata juga terkena dampak dari pandemi ini. Pariwisata merupakan salah satu industri yang paling banyak meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, banyak tempat wisata yang harus ditutup untuk waktu yang belum ditentukan. Selain itu, pandemi Covid-19 di NTT juga berdampak pada hasil panen dan pendapatan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terhambatnya jalur distribusi barang dan menurunnya permintaan membuat para petani menjadi lebih rentan. Angka jumlah penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Angka Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019 - 2023

Tahun	Ribu Jiwa
2019	1146.32
2020	1153.76
2021	1169.31
2022	1131.62
2023	1141.11

Sumber : BPS 2023

Berdasarkan pada tabel 3 terlihat mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin di Nusa tenggara timur pada tahun 2019 hingga 2021. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1146.32 ribu jiwa, pada tahun 2020 naik menjadi 1153.76 ribu jiwa dan terus naik sampai tahun 2021 menjadi 1169.31 ribu jiwa.

Akan tetapi, tahun 2022 mengalami penurunan kemiskinan menjadi 1131.62 ribu jiwa dan tahun 2023 naik kembali menjadi 1141.11 ribu jiwa.

Kemiskinan dapat memberikan dampak yang serius pada pembangunan manusia karena kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang sebenarnya berawal dari daya beli masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mengabaikan kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, kemiskinan akan menimbulkan ancaman yang signifikan bagi pembangunan manusia diantara keduanya, dan pada akhirnya akan menghasilkan target pencapaian IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Rorong, 2022).

Essay On Population adalah buku pertama yang menguraikan teori Malthus tentang populasi. Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat daripada pertumbuhan bahan makanan. Ketersediaan makanan diikuti oleh deret hitung, sedangkan pertumbuhan penduduk diikuti oleh deret ukur. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan populasi dapat menyebabkan kekurangan makanan (Conway, 2015).

Todaro, 2004 (Dalam Siagian dan Budhi, 2023) menyatakan bahwa Faktor lain mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

Pengangguran adalah salah satu faktor yang menentukan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, dan upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran sama pentingnya. Secara teori, jika masyarakat tidak menganggur, berarti mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan tersebut diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, masyarakat tidak akan mengalami kekurangan, yang berarti kemiskinan dapat dikurangi (Hatta and Khoirudin 2020). Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019 - 2023

Tahun	TPT %
2019	3.35
2020	4.28
2021	3.77
2022	3.54
2023	3.14

Sumber : BPS 2023

Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,35 persen, kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 4,28 persen, pada tahun 2021 menurun menjadi 3,77 persen pada tahun 2022 sampai 2023 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan hingga 3,14 persen. Persentase tingkat pengangguran tertinggi Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Persentase Tingkat Pengangguran tertinggi Kabupaten di
Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019 - 2023

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Kupang	9.78	10.9	9.76	8.55	5.69
Belu	7.19	7.42	5.35	6	5.45
Lembata	4.31	4.88	4.94	4.74	2.55
Manggarai Barat	2.42	3.72	4.94	4.91	4.42
Kupang	4.48	4.9	3.99	3.23	3.22
Sikka	3.56	4	4.54	4.51	2.62
Rote Ndao	2.73	4.9	3.67	3.64	3.65

Sumber : BPS 2023

Adapun tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 10,90 persen dan Belu 7,42 persen, lainnya di bawah 7 persen. Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2021 dan pada tahun 2023 terjadi penurunan terus menerus, namun meskipun menurun angka tersebut masih cukup tinggi untuk tingkat penganggurannya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, IPM Indonesia berada di angka 69,55, namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 71,39. Peningkatan ini dapat mengindikasikan bahwa kesejahteraan penduduk Indonesia mulai membaik. Di sisi lain, meskipun IPM Indonesia mengalami peningkatan, namun masih terdapat provinsi dengan IPM terendah setiap tahunnya. Dari 2015 hingga 2018, tiga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua memiliki IPM terendah. Meskipun besaran IPM mereka meningkat setiap tahun, peningkatan ini tidak dapat menyamai besaran IPM Nasional yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita hanya sebesar Rp 14,9 juta per kapita, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah Provinsi dengan PDRB terkecil di seluruh Indonesia, menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2015 (Rosyadah 2021). Pembangunan manusia adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dilihat dari dampak dari pembangunan manusia atau karena perbaikan ekonomi dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kemajuan ekonomi di suatu wilayah dapat meningkatkan nilai IPM. IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Dampak pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat ditunjukkan oleh angka harapan hidup dan daya beli, sedangkan dampak pembangunan yang berdampak pada kondisi non-fisik masyarakat ditunjukkan oleh kualitas pendidikan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurut BPS NTT, menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Program Pembangunan Internasional (UNDP) adalah yang pertama kali memperkenalkan IPM. UNDP pengukuran alternatif kesejahteraan yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Persentase angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 – 2023 dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Persentase Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 -2023

Tahun	IPM %
2019	65.23
2020	65.19
2021	65.28
2022	65.9
2023	66.68

Sumber : BPS 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nusa Tenggara Timur dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus meningkat, meningkatnya IPM Provinsi NTT setiap tahunnya dapat diartikan bahwa masyarakat NTT mulai mengalami peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Walaupun IPM Nusa Tenggara Timur (NTT) selalu naik setiap tahunnya tapi besaran tersebut tidak dapat mencapai rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional (Rosyadah 2021). Meskipun begitu, selama 5 tahun terakhir ada peningkatan dan penurunan angka persentase IPM di NTT. Tahun 2019 persentase senilai 65,23 persen, lalu mengalami penurunan tahun 2020 menjadi 65,19 persen. Tahun selanjutnya 2021 meningkat sebesar 65,28 persen dan turun kembali menjadi 65,9 persen di tahun 2022 karna *impact* dari Covid-19. Tahun 2023 kembali meningkat sebesar 22,68 persen , dimana tahun ini merupakan masa *New normal economic* pasca pandemi Covid-19. Persentase angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi tahun 2019 – 2023 dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Persentase Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi
Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 -2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Kupang	79.55	79.71	79.74	80.2	80.62
Ngada	67.76	67.88	67.88	68.26	69.14
Ende	67.2	67.04	67.3	67.97	68.63
Nagekeo	65.88	65.81	65.82	66.22	67.07
Sumba Timur	65.34	65.52	65.74	66.17	67.05

Sumber : BPS 2023

Periode tahun 2019 hingga tahun 2020 besaran IPM yang dimiliki Kabupaten atau Kota di Provinsi NTT setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, Kota Kupang merupakan Kota yang memiliki angka IPM tertinggi dibandingkan dengan seluruh Kabupaten atau Kota di Provinsi NTT. Lingkungan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, belum tentu dengan jumlah penduduk yang padat kualitas lingkungan akan menjadi buruk dan kesejahteraan masyarakat sulit untuk dicapai. Penduduk merupakan orang yang tinggal di kota, desa, atau tempat lain disebut penduduk. Peningkatan jumlah penduduk ini menghasilkan peningkatan tenaga kerja, yang dapat meningkatkan produksi dan membuka pasar,

yang dapat mendukung pembangunan. Jumlah penduduk yang terus meningkat namun tidak diiringi dengan naiknya berbagai unsur pertumbuhan lainnya dapat menyebabkan pendapatan yang tidak meningkat dan juga permintaan yang tidak akan meningkat Anggraini DKK (2022). Masalah kemiskinan yang masih berkaitan dengan banyaknya jumlah penduduk, yaitu ketersediaan lapangan kerja yang belum dapat memenuhi kebutuhan angkatan kerja yang diciptakan, yang pada gilirannya menyebabkan pengangguran, yang pada gilirannya menyebabkan kemiskinan. Selain jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, diduga kualitas hidup manusia juga mampu menjadi faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Teori Nelson dan Leibstelin mengatakan penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat berpengaruh langsung. Mereka menunjukkan bahwa ketika jumlah penduduk meningkat dengan cepat di negara berkembang, tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang signifikan dan jumlah penduduk miskin akan meningkat dalam jangka panjang.

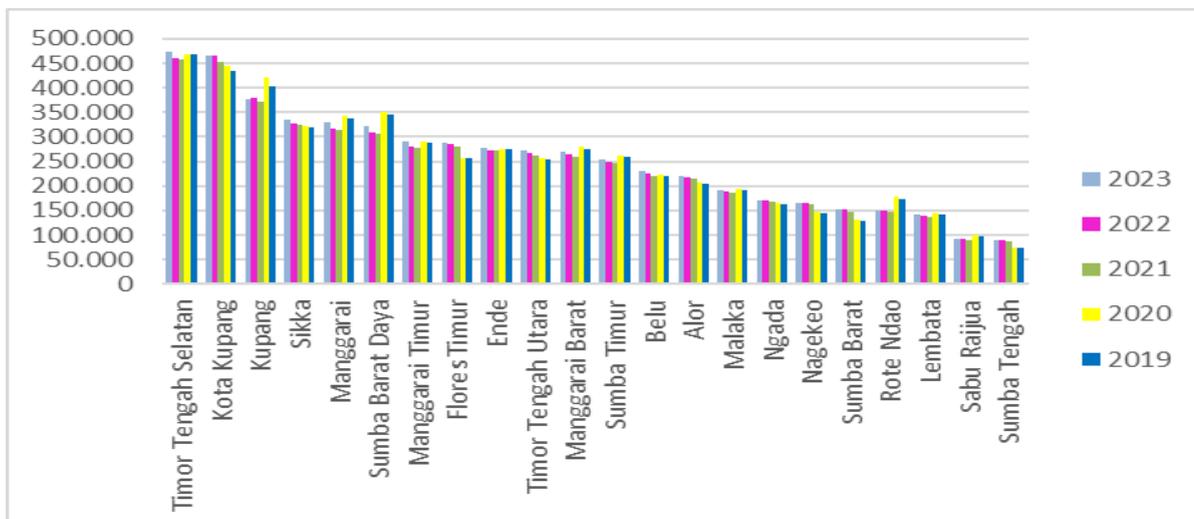
Angka jumlah penduduk provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8
Angka Jumlah Penduduk 5 tahun terakhir Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)
2019	5,569,068
2020	5,466,285
2021	5,387,738
2022	5,541,394
2023	5,456,203

Sumber : BPS 2023

Pada tabel 8 menunjukkan angka jumlah penduduk provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2019 jumlah penduduk cenderung turun mulai 5,569,068 hingga 5,387,738 juta jiwa di tahun 2021. Kemudian, naik di tahun 2022 menjadi 5,541,394 juta jiwa dan turun kembali menjadi 5,456,203 tahun 2023.



Grafik 1. Jumlah Penduduk Provinsi NTT 2019 -2023

Dapat dilihat pada grafik 1 jumlah penduduk yang ada dan menyebar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2019 - 2023. Gambar grafik ini menjelaskan adanya persebaran jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak merata di tiap wilayah. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) masih memiliki jumlah penduduk tertinggi dimana tercatat bahwa pada tahun 2019 sebesar 467.990 ribu jiwa dan terus meningkat hingga tahun 2023 dengan jumlah penduduk sebesar 474.521 ribu jiwa. Tingginya jumlah penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah linier dengan besarnya jumlah penduduk miskin di kabupaten itu.

Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti pengangguran, jumlah penduduk yang terus meningkat, pendidikan yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat digunakan sebagai ukuran makro. Meskipun digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan tidak mencerminkan kemampuan setiap masyarakat secara individual.

TINJAUAN PUSTAKA

Todaro (1969) menekankan bahwa kemiskinan bukanlah hanya masalah kurangnya pendapatan, tetapi juga merupakan hasil dari ketidakmampuan individual untuk mengakses sumber daya ekonomi yang ada. Dia mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan, termasuk ketidakselarasan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, serta ketidakstabilan politik dan sosial.

Salah satu konsep kunci dalam teori Todaro adalah "pengangguran tersembunyi", yang merujuk pada situasi di mana individual bekerja di sektor informal dengan upah rendah atau bahkan tanpa upah, karena kurangnya kesempatan kerja formal. Ini sering kali terjadi di daerah perkotaan di negara berkembang, di mana pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Selain itu, Todaro menyoroti pentingnya pembangunan manusia, yang mencakup investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena kemiskinan masih menjadi isu sentral bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada September 2022 tingkat kemiskinan sebesar 20,23 persen, menurun 0,21 persen poin dibanding tahun 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 1,15 juta meningkat 2,9 ribu orang terhadap September 2021 (BPS NTT, 2023), sehingga pada tahun 2022, pandemi sudah jauh menurun dan berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi sudah berjalan melunjur normal (Dahlan and Mulianingsih, 2023).

Teori Mankiw, pengangguran adalah masalah yang sangat rumit yang dapat memengaruhi masyarakat secara langsung. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mereka menghadapi tekanan psikologis dan penurunan standar hidup. Oleh karena itu, masalah pengangguran sudah tidak asing lagi bagi kita karena telah menjadi topik diskusi di setiap daerah dan juga dibahas oleh para politikus dan politisi. Sering kali, keduanya mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja baru.

Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu, tetapi orang kaya adalah mereka yang memiliki pekerjaan penuh waktu. karena terkadang orang ingin mencari pekerjaan yang menguntungkan, tetapi tidak memiliki kemampuan yang diperlukan. Jika seseorang memiliki pekerjaan, kemakmurannya akan meningkat, tetapi jika tidak, kemakmurannya akan menurun

(Susanto, 2017).

Secara umum, populasi suatu negara cenderung meningkat dua kali lipat setiap 30-40 tahun, menurut Maltus (dikutip dalam Arsyad, 1997). Pada saat yang sama, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung karena hasil dari faktor produksi tanah menurun. Pendapatan per kapita (didefinisikan dalam masyarakat tani sebagai produksi pangan per kapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah karena pertumbuhan persediaan pangan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat kecepatan tinggi. Ini akan menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil atau hanya sedikit di atas tingkat subsisten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data diambil dari Badan Pusat Statistik. Variabel yang digunakan adalah pengangguran, Indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk. Penelitian ini menggunakan data panel pada tahun 2019-2023, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab naiknya jumlah penduduk miskin di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel model *random effect*, maka model yang tepat dalam melakukan olah data yakni:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \dots \dots \dots 1)$$

Keterangan:

α merupakan konstanta umum

Y_{it} nilai variabel dependen untuk individual i pada waktu t

$\beta_1, \beta_2,$ dan β_3 adalah koefisien regresi yang perlu diestimasi

X_{1it}, X_{2it} dan X_{3it} adalah nilai dari variabel independen untuk individual i pada waktu t

e_{it} komponen eror yang bervariasi dalam waktu dan antar unit

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data panel perlu di regresi karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan data *cross-sectional* atau *time series* tunggal. Pertama, data panel mengandung informasi yang lebih kaya karena mencakup dimensi waktu dan unit individual (seperti perusahaan, negara, atau rumah tangga). Dengan demikian, analisis data panel dapat mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak dapat dilihat dalam analisis *cross-sectional* atau *time series* biasa. Misalnya, dengan data panel, peneliti dapat mengontrol heterogenitas individual yang tidak teramati, sehingga dapat memberikan estimasi yang lebih akurat dan bebas bias terhadap parameter model, berikut beberapa uji data panel:

UJI MODEL PANEL

Uji chow

Uji chow digunakan untuk memilih model dari regresi data panel yang terbaik antara CEM DAN FEM dari data yang nanti di peroleh. Model CEM akan muncul jika nilai probabilitas lebih tinggi dari pada α sedangkan FIM muncul jika lebih kecil daripada α . Uji Chow dapat di lihat pada tabel 1.1

Tabel 9. Regresi data panel chow

Nilai probabilitas - F	0,0000*
------------------------	---------

*signifikan pada alfa 5%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *p-value* F statistik $0,0000 < \alpha 0,05$ maka model yang terpilih adalah *fixed effect*. Tabel tersebut memperlihatkan adanya nilai p untuk uji F ialah $0,0000 < \text{tingkat signifikansi } 0,05 (\alpha)$. Akibatnya, Penelitian ini menolak hipotesis nol (H_0). Karena hal tersebut, berdasarkan temuan ini, dapat

menyimpulkan bahwa model *fixed effect* terpilih sebagai metode yang paling tepat.

Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan antara *fixed effect* model dan *random effect model* dengan tujuan untuk menentukan model mana yang sebaiknya digunakan. Uji Hausman dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Chi2(2)=0,71
Prob>chi2=0,7009
*signifikan pada alfa 5%

Dari hasil uji tersebut dapat diketahui nilai *p-value* sebesar $0,7009 > \alpha 0,05$ maka yang terpilih adalah model *random effect*. Tabel di atas membuktikan nilai p Chi² adalah 0,7009, yang lebih besar dibanding tingkat signifikansi 0,05, maka Penelitian ini menerima H₀. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan jika model *random effect* sebagai pilihan yang paling tepat.

UJI LM (Lagrange multiplier)

Chibar2(01) = 206.23
Pro > chibar2 = 0.0000*
*signifikan pada alfa 5%

Dari hasil uji LM tersebut bisa dilihat bahwa nilai *p-value* $0,0000 < 0,05$ alpha yang terpilih adalah model *Random effect*

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas bisa dilihat pada tabel 4.1 berikut

	X1	X2	X3
X1	1.0000		
X2	0.0118	1.0000	
X3	0.6083	0.0097	1.0000

Di dalam tabel tersebut koefisien korelasi sebesar $0,0118 < 10$ pada variabel X1 pengangguran dengan X2 jumlah penduduk, dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut bebas dari uji multikolinieritas, sehingga tidak terjadi masalah pada variabel tersebut. Selanjutnya untuk variabel X1 pengangguran dengan X3 IPM menunjukkan nilai korelasi sebesar $0,6083 < 10$ disimpulkan bahwa hasil ini juga bebas dari uji atau lolos uji multikolinieritas, terakhir yaitu X2 jumlah penduduk dan X3 IPM mendapatkan nilai korelasi sebesar $0,0097 < 10$ variabel ini juga bebas atau lolos uji multikolinieritas sehingga di ketiga variabel tidak terdapat adanya masalah.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bisa dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 13. Uji heteroskedastisitas

Chi2(1) = 0.18
Prob > chi2 = 0.6682

*signifikan pada alfa 5%

Dari hasil uji tersebut menunjukkan nilai 0,6684 menjelaskan bahwa seluruh probabilitas variabel bebas lebih besar dari alfa 0,05 maka H0 tidak ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 0,6684>0,05.

Persamaan regresi data panel

Berdasarkan uji model terbaik regresi panel diperoleh hasil model terbaik adalah model Random Effect Model. Berikut hasil regresi model panel terbaik.

Tabel 14. hasil uji persamaan regresi data panel

Dependen Variabel = Y (Kemiskinan)	Coef.
X1	-.0069517
X2	.1542232
X3	-.651162
_cons	55.3531

$$Y=55,3531 - 0,0069517 X1 - 0,1542232 X2 - 0,651162 X3.....2)$$

Berikut merupakan penjelasannya:

Nilai konstanta sebesar 55,3531 artinya tanpa adanya variabel (X1) (X2) dan (X3) maka variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) mengalami peningkatan sebesar 553,531. Nilai koefisien variabel (X1) pengangguran sebesar -0,0069517 jika nilai variabel lain konstan dan variabel (X1) pengangguran mengalami peningkatan 1%, maka variabel (Y) kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 6,9517%. Begitu pula sebaliknya.

Nilai koefisien beta variabel (X2) jumlah penduduk sebesar 0,1542232, jika nilai variabel lain konstan dan variabel (X2) jumlah penduduk mengalami peningkatan 1%, maka variabel (Y) kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 1,542232%.belgitul juga sebaliknya.

Nilai koefisien beta variabel (X3) IPM sebesar 0,651162, jika nilai variabel lain konstan dan variabel (X3) IPM mengalami peningkatan 1%, maka variabel (Y) kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 65,1162%. Begitu pula sebaliknya

HASIL UJI HIPOTESIS

Untuk mengetahui penyebab naiknya jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan uji hipotesis Z yang dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 15. Hasil uji hipotesis Z (dengan menggunakan model random effect)

y	Coef.	Std.Err.	z	p> z	[95% conf	Interval]
X1	-.0069517	.0386685	-0.18	0.857	-.0827407	.0688373
X2	.1542232	.0197163	7. 82	0.000*	.1155799	.1928665
X3	-.651162	.0461001	-14.12	0.000*	-.7415167	-.5608074
_cons	55.3531	3.55518	15.57	0.000*	48.38507	62.32112
Sigma_u	5.7246021					
Sigma_e	.31765517					
rho	.99693037					

*signifikan pada alfa 5%

Hasil uji Z pada variabel (X1) pengangguran memperoleh nilai Z hitung sebesar -0,18 < 1,96 Z tabel dan nilai sig 0,857 > 0,05 HA di tolak dan H0 tidak ditolak artinya Variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Hasil uji Z pada variabel (X2) jumlah penduduk diperoleh nilai Z hitung sebesar 7,82 > 1,96 Z tabel dan nilai sig 0,000 < 0,05 yang terjadi yaitu HA tidak ditolak dan H0 ditolak artinya Variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap Y.

Hasil uji Z pada variabel (X3) IPM diperoleh nilai Z hitung sebesar -14,12 > 1,96 Z tabel dan nilai sig 0,000 < 0,05 maka HA di terima dan H0 ditolak artinya Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Y.

HASIL UJI F DAN HASIL KOEFISIEN DETERMINASI (R2)

Tabel 16. hasil uji F dan hasil koefisien determinasi R-square

Number of obs	110
F(3,106)	26.85
Prob> F	0.0000*
R-squared	0.4318
Adj R-squared	0.4157
Root MSE	5.3236

*signifikan pada alfa 5%

Dari tabel diatas F hitung sebesar 26,85 > nilai F tabel Yaitu 2,46 dan nilai sig. 0,0000 < alfa 0,05 maka H0 ditolak dan Ha tidak ditolak, artinya variabel X1(pengangguran), X2 (jumlah penduduk) , X3 (IPM) berpengaruh terhadap Y kemiskinan.

Nilai adjust R square sebesar 0,4318 atau 43,18%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pengangguran, jumlah penduduk dan IPM mampu menjelaskan variabel Y di provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 43,18% sedangkan sisanya 56,82% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Berdasarkan hasil uji z pada variabel (X3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh nilai z hitung sebesar -14,12 > z tabel 1,96 dan nilai sig. 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha tidak ditolak, artinya variabel IPM berpengaruh terhadap variabel Kemiskinan dengan nilai berlawanan (Negatif). Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Sofilda et al., 2016) di dalam penelitiannya mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua.

Studi oleh Ravallion (2001) menunjukkan bahwa daerah dengan IPM tinggi cenderung memberikan efek spillover yang positif pada daerah sekitarnya, yang juga membantu mengurangi kemiskinan. Ini karena daerah dengan IPM tinggi sering menjadi pusat ekonomi yang menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, yang manfaatnya dapat menyebar ke daerah-daerah sekitar.

Komponen lain dari IPM adalah kesehatan. Ahli ekonomi pembangunan seperti Amartya Sen menekankan pentingnya kesehatan yang baik dalam meningkatkan produktivitas individual. Masyarakat yang sehat lebih mampu bekerja secara efisien dan produktif, sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Penelitian oleh Bloom dan Canning (2000) menunjukkan bahwa peningkatan status kesehatan memiliki korelasi kuat dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Salah satu komponen utama dari IPM adalah tingkat pendidikan. Pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, yang pada gilirannya membuka peluang kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih

tinggi. Menurut Todaro (2005), peningkatan akses dan kualitas pendidikan adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan karena meningkatkan kapasitas individu untuk bekerja dan berkontribusi pada perekonomian.

Jumlah Penduduk

Dari hasil yang di dapatkan dari uji z variabel (X2) jumlah penduduk memperoleh nilai z sebesar 7,82 > z tabel 1,96 dan nilai sig. 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak Ha tidak ditolak, variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap variabel Y dengan nilai positif. Hal ini selaras dengan Salah satu peneliti yang sering dikaitkan dengan pandangan ini adalah Thomas Malthus. Malthus mengemukakan teorinya dalam karyanya yang terkenal, "*An Essay on the Principle of Population*" (1798). Dia berpendapat bahwa populasi cenderung tumbuh secara eksponensial sementara sumber daya seperti makanan hanya tumbuh secara aritmetis. Akibatnya, tanpa kontrol populasi, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan kelangkaan sumber daya dan, pada akhirnya, peningkatan kemiskinan dan penderitaan.

Malthus berpendapat bahwa ketika populasi meningkat, persaingan untuk sumber daya yang terbatas akan meningkat, yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat kesejahteraan individu dan meningkatkan tingkat kemiskinan. Pemikirannya ini sering dirujuk dalam diskusi tentang hubungan antara populasi dan kemiskinan, meskipun banyak ekonom modern juga mengkritisi dan memperbaiki teori-teorinya berdasarkan data dan analisis kontemporer.

Sukirno (2014), jumlah penduduk dapat menjadi pendorong pembangunan sekaligus penghambat pembangunan. Faktor utamanya adalah kemungkinan penambahan jumlah pegawai. Kedua, besar kecilnya pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk, sehingga pasar semakin besar. Saat ini jumlah penduduk disebut sebagai faktor penghambat pembangunan karena dapat menurunkan tingkat produktivitas dan menimbulkan pengangguran massal. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menurunkan output per kapita. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga harus dibarengi dengan peningkatan input lainnya. Tanpa input lain seperti modal, maka akan terjadi tambahan akibat yang semakin berkurang (pengurangan keuntungan). Situasi ini mengurangi kontribusi daerah terhadap Produk Domestik Bruto Regional (PDRB).

PENUTUP

Kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil uji z Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai z hitung sebesar -14,12 menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan didukung oleh penelitian terdahulu. Daerah dengan IPM tertinggi cenderung mempunyai dampak positif terhadap daerah sekitarnya, yaitu mengurangi kemiskinan dengan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, selain itu, Kesehatan yang baik juga ditekankan oleh ekonom pembangunan seperti Amartya Sen, akan meningkatkan produktivitas individu dan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, pendidikan, yang merupakan salah satu komponen IPM, meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja, serta berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Hasil uji z terhadap jumlah penduduk menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap variabel Y, sejalan dengan teori Thomas Malthus mengenai pertumbuhan penduduk dan kelangkaan sumber daya yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan. Pertumbuhan penduduk dapat mendorong pembangunan namun juga menghambatnya dengan menurunkan produktivitas dan menyebabkan pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa tambahan input seperti modal dapat menyebabkan berkurangnya keuntungan dan rendahnya kontribusi daerah terhadap Produk Domestik Bruto. Tingginya angka pengangguran di NTT mungkin menjadi salah

satu faktor penyebab utama terjadinya kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan kebijakan yang fokus pada penciptaan lapangan kerja, program pelatihan keterampilan, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan mendorong investasi di bidang-bidang yang berpotensi mengurangi pengangguran dan berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, Yezua, Rani Nooraeni, and Eni Lestariningsih. 2023. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan Secara Langsung Dan Tidak Langsung Di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Statistika Terapan (ISSN 2807-6214)* 3(01): 78–89.
- Anggraini, Debi, Muchtolifah Muchtolifah, and Sishadiyati Sishadiyati. 2022. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan." *Jambura: Economic Education Journal* 4(1): 87–96. doi:10.37479/jeej.v4i1.11198.
- Bastian, Misty L. 1999. "Africa's Ogun: Old World and New." *American Anthropologist* 101(1): 201–2. doi:10.1525/aa.1999.101.1.201.
- Dahlan, Lilis Sholihah, and Mulianingsih Mulianingsih. 2023. "Reformasi Birokrasi." *Jurnal Media Birokrasi* 3(1): 41–58. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/3189>.
- Didu, Saharuddin, and Ferri Fauzi. 2016. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak." *Jurnal Ekonomi-Qu* 6(1): 102–17. doi:10.35448/jequ.v6i1.4199.
- Ferezagia, Debrina Vita. 2018. "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1(1). doi:10.7454/jsht.v1i1.6.
- Hatta, Rosdianawaty, and Rifki Khoirudin. 2020. "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Propinsi NTT: Pendekatan Dua Panel." *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 11(2): 138–50. doi:10.33059/jseb.v11i2.2004.
- Kamsina, S, and R Khoirudin. 2024. "Determinan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia." *Jurnal Genesis Indonesia* 3(01): 15–24. doi:10.56741/jgi.v3i01.477.
- Nabibah, Emilia Titah, and Nurul Hanifa. 2022. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur." *Independent: Journal of Economics* 2(3): 1–13. doi:10.26740/independent.v2n3.p1-13.
- Padang, Reinildis Noviani, and Shanty Ratna Damayanti. 2021. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dr Soetomo* 28 Edition(September 2021): 29–46.
- Rorong, Ita Pingkan Fasnje. 2022. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 23(4): 398–415.
- Rosyadah, Jihan Aqilah. 2021. "Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)." 4(1): 1080–92.
- Siagian, Fenny Elfride, and Made Kembar Sri Budhi. 2023. "Pengaruh Beban Tanggungan, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 12(11): 2319. doi:10.24843/eeb.2023.v12.i11.p20.
- Yacoub, Yarlina. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat." 8: 176–85.
- Yustika, Baiq Reka, Muhammad Ghofur Wibowo, Anava Salsa, Nur Savitri, and Ahmad Ulil. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk , Upah Minimum Dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

